Bali Post

Bali Post/kmb

TELANTAR - ***Aset milik Pemprov Bali di Klungkung yang telantar.***

Aset Pemprov Jadi Tempat Aksi Vandalisme

Semarapura (Bali Post) –

Kondisi aset milik Pemprov Bali yang berada di Jalan Kartini, Semarapura, Tengah, Klungkung, betul-betul memprihatinkan. Pasalnya, bangunan yang sempat dipakai Kantor Panwaslu Klungkung ini tidak hanya telantar, namun juga dipakai aksi vandalisme atau corat-coret oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, lokasinya berada persis di bagian timur Polres Klungkung.

Dari pantauan di lapangan, Minggu (30/8) kemarin, aset milik Pemprov Bali itu benar-benar tidak terurus. Bagian tembok depan bangunan dipenuhi corat-coret kapur. Bagian halaman depan bangunan yang berukuran sekitar 18 x 10 meter ini dipenuhi sampah yang berserakan. Sementara di halaman belakang yang cukup luas telah ditumbuhi rumput liar, sehingga membuat bangunan ini menjadi seram seperti rumah hantu.

Bangunan tersebut dibiarkan begitu saja, tidak ada yang mengurus. Buktinya, lampu yang tergantung di bagian depan dibiarkan tetap menyala di siang hari. Kondisi ini berlangsung setiap hari. Salah seorang petugas kebersihan Klungkung yang ditemui di depan bangunan tersebut tidak menampik kondisi itu. "Rumputnya sudah tinggi-tinggi, mungkin saja telah jadi sarang ular," ujarnya.

Pemkab Klungkung sampai saat ini belum ada rencana meminjam gedung tersebut sebagai tempat perkantoran, padahal masih kekurangan kantor untuk beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekda Klungkung Putu Gede Winastra ketika dikonfirmasi mengakui belum ada rencana meminjam aset milik Pemprov Bali tersebut. Salah satu SKPD yang saat ini belum memiliki kantor representatif adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Klungkung sendiri baru dibentuk dan masih meminjam rumah jabatan pimpinan dewan. Kondisinya pun sangat memprihatinkan, karena tidak cocok untuk perkantoran dan tidak bisa digunakan menampung peralatan yang dimiliki BPBD.

Winastra mengatakan, pemkab sudah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan kantor BPBD. "Suratnya sudah dikirim ke pusat. Rencananya kami manfaatkan lapangan basket di Jalan Ngurah Rai, tapi lapangan itu akan ditata dan dikembalikan fungsinya," ungkapnya. Ditambahkannya, untuk membangun kantor BPBD, pemkab berencana memanfaatkan lahan di sebelah timur kantor Dinas Pertanian Klungkung. Soalnya, kantor BPBD membutuhkan lahan sekitar 10 are plus gudang untuk menampung peralatan. **(kmb)**

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 16

Bali Post

Banyak DED Tak Terealisasi

Eksekutif Diminta Realistis

Semarapura (Bali Post) –

Perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung saat ini baru sebatas rencana. Ini terlihat dari banyaknya *detail engineering design (DED)* yang sampai saat ini belum terealisasi. Anggota DPRD Klungkung Sang Nyoman Putrayasa menyoroti kinerja Pemkab Klungkung terkait perencanaan pembangunan ini. Eksekutif dinilai terlalu banyak menyusun DED, namun sedikit yang bisa dikerjakan.

Kader PDI-P Dapil Banjarangkan itu mengungkapkan, kepemimpinan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta belum dirasakan dalam pengembangan pembangunan. Segala rencana yang dicetuskan orang nomor satu tersebut belum juga terealisasi. "Saya lihat DED yang disusun sudah banyak, namun realisasinya masih minim sekali," terang Sang Nyoman Putrayasa, Minggu (30/8) kemarin.

Ia menyebut DED untuk pembuatan Jembatan Sulang yang menghubungkan Desa Sulang dengan Desa Satria sampai saat ini tidak jelas rimbanya. Begitu pula penyusunan DED untuk penataan Kawasan Belatung-Goa Lawah, Goa Jepang, Jalan Lingkar Nusa Penida, Pura Watu Klotok, dan masih banyak lagi. "Memang dijanjikan terealisasi tahun 2016, tapi apa bisa dilaksanakan. Sebab, di sisi lain masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian secara serius," terangnya.

Dijelaskannya lagi, lebih baik Pemkab Klungkung fokus melakukan penataan TPA yang bisa dimanfaatkan untuk 25 tahun ke depan. Di sisi lain, pihaknya meminta eksekutif merencanakan sesuatu yang sifatnya realistis, disesuaikan dengan kemampuan APBD Klungkung. Jangan terlalu banyak menyusun DED, namun anggarannya tidak mencukupi untuk pembangunan. "Realistis saja, perbaiki yang sifatnya urgen dan darurat. Masih ada persoalan sosial yang belum dituntaskan, masih banyak lembaga atau instansi yang belum memiliki kantor," tambahnya.

Sang Nyoman juga mendengar bahwa Pemkab Klungkung bakal melakukan penataan Kantor Bupati. Pihaknya meminta agar melihat APBD yang ada, mengingat bumi serombotan tidak sekaya Kabupaten Badung. "Sekali lagi tolong dicermati, Klungkung tidak sekaya Kabupaten Badung, sehingga saat ini saya kira penataan itu belum saatnya," tegasnya. **(dwa)**

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 16

Bali Post

Dewan Pertanyakan Rencana Jalan Lingkar Nusa Penida

Semarapura (Bali Post) –

Rencana pemerintah membangun jalan lingkar di wilayah Nusa Penida mulai dipertanyakan kalangan DPRD Klungkung. Salah satunya Wayan Misna. Politisi asal Nusa Penida ini menilai proyek tersebut terkesan mercusuar, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dimulai. "Tampaknya hanya wacana," ujarnya ketika dikonfirmasi belum lama ini.

Menurut kader PDI-P itu, kesan kalau proyek tersebut masih di awing-awang karena pembebasan lahan atau tanah belum juga dilakukan. Karenanya, Misna berharap Pemkab Klungkung jangan hanya memberikan janji-janji surga kepada masyarakat Nusa Penida. Kalau kiranya belum bisa diwujudkan sebaiknya jangan dipublikasikan terlebih dulu. Lebih baik Pemkab Klungkung fokus terhadap proyek yang sudah pasti.

Dia mencontohkan proyek Rumah Umum Sakit Pratama yang sempat gagal diwujudkan tahun ini dan jalan lingkar kecamatan yang pendanaannya berasal dari APBD. Menurutnya, pemerintah mesti fokus terhadap kedua proyek tersebut. Kalau hanya diwacanakan, sedangkan pembebesan lahan belum dilakukan, harga tanah akan terus meningkat. "Kalau ini terjadi, anggaran untuk proyek tersebut akan membengkak," katanya.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat dikonfirmasi meminta semua pihak optimis akan berjalannya proyek tersebut. Pasalnya, saat ini Pemkab Klungkung sedang berusaha keras agar proyek terwujud. Apalagi DED proyek dikerjakan Provinsi Bali. "Semua pihak mesti bersabar dan ikut berjuang mewujudkan proyek tersebut. Anggarannya memang cukup besar sekitar Rp 400 miliar, itu di luar pembebasan tanah, tetapi kajian untuk proyek sudah ada," ujarnya.

Ditanya kapan proyek tersebut akan terwujud, bupati asal Nusa Penida itu belum bisa memastikan. Menurutnya, semuanya tergantung anggaran. Akan tetapi, Suwirta kembali menegaskan bahwa proyek tersebut bukan harapan hampa, namun akan bisa diwujudkan. Pemkab Klungkung sedang berupaya melakukan lobi ke Kementerian PU dengan mengirim gambar-gambar, kajian, dan perencanaan proyek. "Dalam waktu dekat ini kami akan menindaklanjuti dengan menghadap Kementerian PU. Proses juga sedang jalan dan tanah ada," imbuhnya.

68 Hektar

Bupati Suwirta optimis proyek tersebut bakal terwujud, karena masyarakat lewat kajian yang dilakukan sangat mendukung keberadaan jalan lingkar. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang sampai merelakan tanahnya secara gratis untuk mendukung proyek. "Masyarakat saja begitu optimis, mari kita juga optimis. Apalagi pemerintah pusat dan provinsi sedang semangatnya membantu Klungkung. Jangan sampai pemerintah pusat dan provinsi semangat, kita yang malah mengeluarkan wacana yang bikin pesimis," kilahnya.

Jalan lingkar dengan lebar 20 meter itu akan menggunakan lahan seluas 65 sampai 68 hektar. Proses pendataan pemilik lahan diperkirakan selesai Oktober dan November 2015. Lokasi jalan lingkar selatan dan barat melewati lima desa, yaitu Toye Pakeh, Bunga Mekar, Batu Kandik, Batu Madeg, dan Sekar Taji. Sementara jalan IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) melewati dua desa, yaitu Batu Nunggul dan Kutampi Kaler. Proyek jalan lingkar nantinya tidak membelah permukiman dengan jarak dari pantai sekitar 300 sampai 1.000 meter. Posisi jalan berada di luar kawasan padat penduduk dan tidak memindahkan pura atau tempat ibadah sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang ada. **(dwa/kmb)**

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015
Hal : 16

Bali Post

Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada

PN Tunjuk Hakim Praperadilan Kasus Engeline Pimpin Sidang

Denpasar (Bali Post) -

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang juga membawahi Pengadilan Tipikor sudah menunjuk hakim yang akan menyidangkan kasus dugaan korupsi pavingisasi di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Sebagai ketua majelis adalah Achmad Peten Sili, hakim yang menolak permohonan praperadilan Margriet dalam kasus pembunuhan Engeline. Hakim yang dikenal dengan suara keras ini akan memimpin sidang dugaan korupsi penataan jalan di Denpasar, dengan terdakwa Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerti.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Peten Sili, Minggu (30/8) kemarin. Namun, hakim yang sering memutus koruptor dengan hukuman tinggi ini belum bisa memastikan, kapan persidangan akan dilaksanakan. Pasalnya, masih dilakukan koordinasi dengan panitera. Soal jadwal siding, belum ditentukan.

Sebelumnya, dalam uraian perkara sebagaimana dalam berkas dua tersangka, disebutkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kegiatan penataan pedestrian di Jalan Gajah Mada Denpasar, yang dilaksanakan PT Alit Wirajaya dengan nomor: kontrak 650/612/DTRP/2012 (pihak pertama), 50/AWJ/KL/V/2012 (pihak kedua), tanggal kontrak 21 Mei 2012. Direktur PT Alit Wirajaya atas nama Alit Widhiadnyana AS dengan nilai kontrak Rp 2.520.000.000, yang kemudian dilakukan adendum I Nomor: 650/1733.A/DTRP/V/2012 (pihak pertama) 101/AWJ/KL/XI/2012 (pihak kedua) tanggal 28 Nopember 2012.

Diduga, tersangka atas nama Alit Widhiadnyana AS selaku Direktur PT Alit Wira Jaya tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan addendum, namun tetap mendapatkan pembayaran kontraktor pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana Nomor: 639/UN.14.1.31.1.2/PM 03/2013 perihal hasil kajian pembuatan pedestrian Jalan Gajah Mada, Denpasar pada 5 Desember 2013, terungkap banyak item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume yang tercantum pada RAB kontrak addendum dengan total biaya kurang. Setelah dilakukan perhitungan kerugian Negara, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli auditor dari BPKP Perwakilan Bali dengan nomor: SR-573/PW22/5/2014 tanggal 29 September 201, kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.541.795,00.

Sementara tersangka Ngurah Kosala Cakrawerti selaku Direktur CV Unika Desain yang ditunjuk selaku konsultas pengawas dan bekerja melakukan pengawasn berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 650/615/DTRP/2012 tanggal 21 Mei 2012. Dalam uraian berkas penyidikan, tersangka diduga tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan sesuai dengan kontrak sehingga kekurangan pekerjaan yang dilakukan PT Alit Wira Jaya tidak diketahui dan turut menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%. Akibat pengawasan yang tidak teliti dan turut menandatangani kemajuan fisik pekerjaan minggu ke-30 sehingga digunakan PT Alit Wira Jaya mengajukan termin pembayaran, mengakibatkan pembayaran diterima sampai dengan 100%. **(kmb37)**

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 3

Bali Post

Kelola Lahan Eks Tiara Grosir Dipertanyakan, Komitmen Pemkot

Denpasar (Bali Post) –

Sejak ditutup September 2014 lalu, aktivitas Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, Denpasar berhenti total. Pengelolaan lahannya kini diambil alih oleh Pemkot Denpasar. Awalnya, Pemkot Denpasar tidak lagi memperpanjang izin Hak Guna Bangun (HGB) Tiara Grosir, karena lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk UKM Centre. Sayangnya, hingga kini belum ada tanda-tanda lahan itu dikelola dengan baik.

Sejumlah warga Kota Denpasar mulai mempertanyakan komitmen Pemkot Denpasar untuk mengelola lahan itu. Bila sudah ada rencana sejak awal, semestinya Pemkot Denpasar bisa memanfaatkan areal itu agar tidak terlalu lama mubazir. "Apa yang menjadi rencana awal, seperti UKM Centre, harusnya segera digarap. Jangan biarkan lahan yang sangat strategis itu terlalu lama terbengkalai," ujar salah satu warga Kota Denpasar Utara, Ir. I Wayan Bundra, Minggu (30/8) kemarin.

Bundra yang juga anggota DPRD Denpasar periode 2009-2014 mengatakan, semua akan rugi bila lahan tersebut dibiarkan tanpa ada aktivitas. Sektor ekonomi yang sempat berjalan saat dikelola pihak swasta sebelumnya, kini sudah tidak ada lagi. Ini artinya, roda perekonomian yang keluar dari areal itu mandek. Bukan hanya itu, peluang kerja bagi masyarakat juga tertutup. Karena itu, Pemkot Denpasar berkewajiban membuka lagi aktivitas perekonomian di kawasan itu.

Hal serupa diungkapkan warga Denpasar Timur, I Made Kondra, S.H. Ia menilai, pengelolaan lahan eks Tiara Grosir yang sudah dipegang Pemkot Denpasar, harus segera direalisasikan. Program yang sudah ada, harus segera diberikan kepada SKPD yang berkompeten di bidangnya. Seperti Disperindag atau PD Pasar untuk mengelolanya, sehingga tidak terlalu lama tidak ada aktivitas.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Denpasar, Dirut PD Pasar Kota Denpasar I Made Westra menyampaikan niatnya mengelola lahan eks swalayan yang berada di Jl. Cokroaminoto Denpasar itu. Menurut Westra, jika diizinkan mengelola, rencananya pihaknya akan menjadikan lahan eks Tiara Grosir tersebut sebagai pasar tradisional namun dengan konsep modern. Konsepnya, akan ada parkir di setiap lantai. Termasuk, menyuguhkan UKM dan kuliner lokal Bali khususnya Denpasar. "Kalau diserahkan ke PD Pasar, tentu dalam pengelolaannya kami akan bekerja sama dengan investor, seperti pengelolaan gedung film Denpasar Teater," jelasnya.

Menanggapi hal itu, anggota

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 2

Bali Post

Sambungan...

Bali Post/dok

TERBENGKALAI – ***Lahan dan bangunan eks Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, kini terbengkalai. Rencana Pemkot Denpasar menjadikan tempat itu sebagai UKM Center, hingga kini belum ada realisasinya.***

Komisi II Ketut Budiarta mengaku sependapat. Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, rencana PD Pasar mengelola eks lahan maupun bangunan Tiara Grosir paling tidak bisa menampung pedagang-pedagang kecil yang selama ini berjualan di lokasi yang terlarang.

Hal serupa dikatakan anggota Komisi II lainnya, I Kadek Agus Arya Wibawa. Politisi PDI Perjuangan ini meminta, jika pengelolaannya memang diserahkan, diharapkan PD Pasar membuat perencanaan yang matang. "Buat rencana yang tepat. Mungkin seperti pasar sehat dan bersih, sehingga mampu mengurangi pedagang jalanan," usulnya. **(kmb12)**

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 2